

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini meliputi pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan dalam rangka pelayanan publik yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi dan sosial serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Demikian halnya dengan Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Eksistensi Provinsi Gorontalo didedikasikan untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut adanya pemerintahan provinsi yang mandiri yang dapat mengembangkan inovasi, kreativitas, spirit entrepreneur serta lebih responsif terhadap kepentingan publik dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan begitu, jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja pelayanan masyarakat (*public services*) menjadi lebih baik sehingga akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.

Harapan di atas tentu membutuhkan sarana yang dapat memediasi dan atau menginformasikan kinerja Pemerintah Daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan serta dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga membutuhkan umpan balik dari masyarakat dengan mengembangkan mekanisme *check and balancing* yang dimanifestasikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi masyarakat. Dengan kata lain, kewenangan (*authority*) yang dimiliki pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala

Daerah, dalam mengelola kelembagaan pemerintahan dan menjalankan kebijakan pembangunan perlu dibarengi dengan kewajiban untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan (akuntabilitas) kepada publik.

Sejalan dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD mengenai tugas desentralisasi bersifat *'progress report'* penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya berdasarkan PP No. 108 tahun 2000 pasal 17 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja daerah selama jabatan kepala daerah berdasarkan tolok ukur Renstrada/RPJMD.

Dengan di latar belakang oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Gorontalo yang diharapkan dapat menjadi media informasi dan akuntabilitas publik terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2001 - 2006 disusun secara komprehensif, terintegrasi dan informatif tentang aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas aspek keuangan dan program/kegiatan pembangunan daerah yang merupakan akumulasi dari LPJ/LKPJ tahunan yang disampaikan setiap berakhirnya tahun anggaran. Informasi keuangan disajikan dalam bentuk alokasi sumber dana pada kegiatan prioritas selang lima tahun yang dieksplor melalui laporan keuangan. Sedangkan, aspek pembangunan dinarasikan secara kuantitatif dan deskriptif untuk melihat efektifitas program dan kegiatan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan publik (kerangka anggaran) dan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat (kerangka regulasi).

## B. Dasar Hukum

Penyusunan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan 2001 – 2006 Gubernur Gorontalo didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. UU No. 32 Pasal 27 ayat (2) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa : *“ Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat”*.
2. Terkait dengan tugas dan wewenang DPRD, sesuai UU No. 22 pasal 62 ayat (1) huruf f Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPRD yang menegaskan bahwa : *“ DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang: meminta Laporan Keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi”*.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/3052/SJ tanggal 24 Nopember 2004 perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, dimana pada angka IV, nomor 3, menegaskan bahwa : *“ Bagi Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya sampai dengan bula Maret 2005 agar segera mempersiapkan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri bagi Bupati dan Walikota melalui Gubernur dan kepada Presiden bagi Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir “*.

## C. Organisasi Perangkat Daerah

### 1. Struktur Organisasi

Fungsi dan optimalisasi peran dan kinerja Organisasi Pemerintah Provinsi atau sekarang dikenal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah yang membawahi 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan (Asisten 1) yang membawahi tiga biro yaitu Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Organisasi serta Biro Humas dan Protokol; Asisten Pembangunan (Asisten 2) membawahi tiga biro yaitu Biro Pembangunan, Biro Ekonomi, dan Biro Sosial; dan Asisten Administrasi (Asisten 3) yang membawahi Biro Umum dan Perlengkapan. Pelaksanaan tugas teknis dilaksanakan oleh 12 Dinas, 9 Badan dan Sekretaris Dewan. Dinas-dinas meliputi (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; (3) Dinas Perikanan dan Kelautan; (4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan; (5) Dinas PU/Kimpraswil; (6) Dinas Pertambangan dan Energi; (7) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi; (8) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Postel; (9) Dinas Kesehatan; (10) Dinas Kesejahteraan Sosial; (11) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal; dan (12) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, beberapa kantor dan balai telah terbentuk yaitu (1) Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak; (2) Kantor Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan (3) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

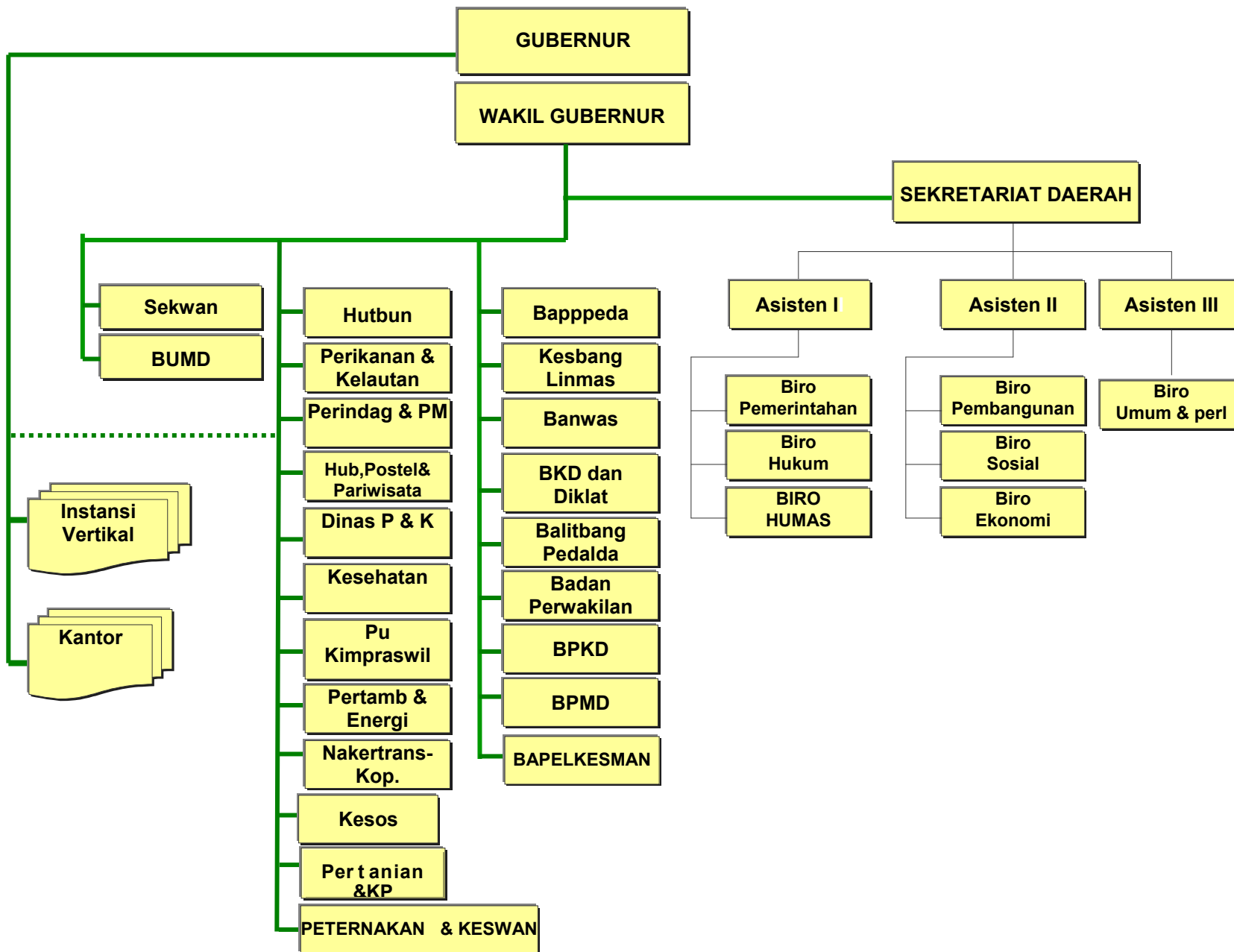
Sedangkan, SKPD yang melaksanakan fungsi tertentu sampai dengan tahun 2006 adalah (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah; (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas; (3) Badan Pengawas Daerah; (4) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; (5) Badan Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan; (6) Badan Perwakilan Jakarta; (7) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; (8) Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (9) Badan Pelayanan Kesehatan Mandiri.

Disamping perangkat organisasi daerah otonom, juga terdapat perangkat organisasi vertikal yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang turut mendukung upaya pencapaian kinerja yaitu:

- a. Kejaksaan Tinggi
- b. Kepolisian Daerah Gorontalo
- c. IAIN Sultan Amai
- d. Universitas Negeri Gorontalo
- e. Kanwil Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
- f. Kanwil Agama
- g. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- h. Kanwil BKKBN
- i. Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran
- j. Kantor Pelayanan Pajak
- k. Badan Metereologi dan Geofisika
- l. Badan Pusat Statistik.
- m. Kantor Imigrasi
- n. Badan Karantina Pertanian
- o. Balai Pengelolaan DAS Bone Bolango
- p. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
- q. Pengadilan Tinggi Gorontalo
- r. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
- s. Pangkalan TNI AL Gorontalo (Persiapan)
- t. Komando Satuan Radar 224 Kwandang
- u. Balai Penelitian Teknologi Pertanian
- v. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
- w. PT. PLN (Persero) Gorontalo
- x. Bandara Jalaludin
- y. Pelabuhan Anggrek
- z. Pelabuhan Penyeberangan

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Gorontalo



## **2. Tugas Pokok**

### **a. Sekretaris Daerah**

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk umum Gubernur di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Administrasi serta tugas-tugas umum lainnya.

### **b. Asisten Pemerintahan**

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk umum Gubernur di bidang pemerintahan.

### **c. Asisten Pembangunan**

Asisten Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk umum Gubernur di bidang administrasi pembangunan.

### **d. Asisten Administrasi**

Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk umum Gubernur di bidang administrasi umum.

### **e. Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan/Pengendalian Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah.

### **f. Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas**

Badan ini mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik serta tugas Dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah.

**g. Badan Pengawas**

Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

**h. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang Kepegawaian Daerah.

**i. Badan Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan**

Mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan serta tugas Dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah.

**j. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

**k. Badan Pelayanan Kesehatan Mandiri**

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan manajemen penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan memprioritaskan keluarga miskin

**l. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai pengelola fiskal, pengelola pendapatan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan lainnya.

**m. Sekretariat Dewan**

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

**n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi serta tugas perbantuan lainnya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

**o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan lainnya di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

**p. Dinas Perikanan dan Kelautan**

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan lainnya di bidang Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

**q. Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas perbantuan lainnya di bidang kehutanan dan perkebunan.

**r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas perbantuan lainnya di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.

**s. Dinas PU Kimpraswil**

Dinas PU Kimpraswil mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada daerah Provinsi Gorontalo, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**t. Dinas Pertambangan dan Energi**

Dinas Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan lainnya di bidang Pertambangan dan Energi.

**u. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi**

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi mempunyai tugas Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di bidang Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi.

**v. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Postel**

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Postel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Gorontalo sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

**w. Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan.

**x. Dinas Kesejahteraan Sosial**

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah (desentralisasi) dan melaksanakan kewenangan dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial.

**y. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal**

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal.

**z. Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak**

Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, Peramalan dan Pengendalian serta Pananggulangan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Hewan/Ternak dan Penyakit di bidang Pertanian.

**aa. Kantor Pengawasan dan Sertifikasi Benih**

Kantor Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan kewenangan Kabupaten/ Kota dalam bidang Pengawasan Mutu Benih dan Pengembangan Varietas.

**bb. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar**

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model, bimbingan dan uji coba Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

**D. Mekanisme Pengorganisasian**

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, melalui wakil-wakilnya di DPRD Provinsi, memberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur bersama jajarannya) untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan dengan berpedoman pada dokumen jangka menengah berupa Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002-2004 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Gorontalo 2005-2007. Materi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo memuat 3 agenda pembangunan yang kemudian diformulasikan dalam 19 Prioritas Pembangunan Daerah.

Untuk mencapai arah dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, diperlukan pola manajemen dalam satu rentang kendali untuk menjamin koneksitas fungsi dan tugas masing-masing SKPD. Gubernur bersama Wakil Gubernur selaku Kepala Daerah mengimplementasikan operasionalisasi kebijakan melalui Sekretaris Daerah

Provinsi sebagai pembantu utama di bidang administrasi kebijakan. Selanjutnya secara teknis administrasi, Sekretaris Daerah mendistribusikan fungsi-fungsi organisasi dalam bentuk tugas yang dapat dibedakan dalam tiga fungsi yakni : 1) Fungsi perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah; 2) Fungsi pelaksanaan oleh seluruh unit teknis (Dinas dan Badan) otonom daerah, selain pelaksanaan tugas dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal di daerah; serta 3) Fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Daerah.

Melalui distribusi fungsi-fungsi di atas, rencana tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas, atau saat ini dikenal dengan Kebijakan Umum Anggaran, dituangkan dalam kegiatan masing-masing SKPD melalui kerangka regulasi dan anggaran yang secara formal termuat dalam APBD maupun kegiatan yang dibiayai APBN tahun 2001 - 2006. Seiring dengan pelaksanaan tugas SKPD baik dibiayai lewat APBD dan APBN maupun instansi vertikal di daerah diharapkan menghasilkan sinergi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Kondisi Awal**

Provinsi Gorontalo merupakan hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 dengan luas wilayah mencapai 12.215,45 km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak antara 0,19' – 1,15' Lintang Selatan dan 121,23' – 123,43' Bujur Timur, yang diapit oleh provinsi induk Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur dan Barat, sedangkan di sebelah Utara dan Selatan diapit oleh Laut Sulawesi dan Teluk Tomini.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2001 jumlah penduduk Gorontalo mencapai 850.798 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 70 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk miskin Gorontalo mencapai 96.560 Kepala Keluarga (KK) atau 72 % dari total KK di Gorontalo. Sebagian besar

penduduk miskin tersebut bekerja di sektor pertanian dalam arti luas (pertanian dan perikanan).

Berikut ini akan di uraikan kondisi awal Provinsi Gorontalo tahun 2001 berdasarkan bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang sosial budaya serta bidang infrastruktur.

### **1. Bidang Pemerintahan**

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan pada masa awal kepemimpinan Ir. Fadel Muhammad dan Ir. Gusnar Ismail, MM selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo diliputi oleh semangat Otonomi Daerah sebagai implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dengan wilayah administrasi meliputi :

- 1) Kabupaten Gorontalo terdiri dari 13 Kecamatan dan 232 Desa/Kelurahan;
- 2) Kabupaten Boalemo terdiri dari 5 Kecamatan dan 95 Desa/Kelurahan; dan
- 3) Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi terdiri dari 3 Kecamatan dan 45 Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo akan diuraikan sebagai berikut.

#### **a. Struktur Kelembagaan**

Secara umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Penataan struktur dan kelembagaan, optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peningkatan kualitas SDM aparatur serta penataan sistem dan prosedur pemerintahan telah menjadi perhatian serius sejak pemerintahan Provinsi Gorontalo berdiri.

Jumlah dan struktur kelembagaan disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan ketentuan perundang-undangan dengan prinsip *miskin struktur-kaya fungsi*. Adapun struktur kelembagaan Provinsi Gorontalo pada saat serah terima jabatan dari Penjabat Gubernur Tursandi Alwi, SH, MM kepada Gubernur terpilih Ir. Fadel Muhammad terdiri atas; 1 Setda, 2

Asisten, 3 Badan, 9 Dinas, 6 Biro dan 1 Sekretariat. Struktur ini menunjukkan masih adanya rangkap tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Satuan Kerja sehingga lingkup kerjanya menjadi lebih luas. Sementara disatu sisi, rangkap tugas tersebut belum diimbangi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sedangkan untuk instansi vertikal tingkat provinsi pada tahun 2001/2002 antara lain (1) Badan Pusat Statistik, (2) Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran, (3) Kanwil Badan Pertanahan Nasional, (4) Kanwil BKKBN, (5) Kanwil Departemen Agama dan (6) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Bolango. Juga terdapat beberapa instansi vertikal yang sebelumnya memang telah ada di Gorontalo antara lain (7) STAIN Sultan Amai (sekarang IAIN), (8) IKIP Gorontalo (sekarang Universitas Negeri Gorontalo), (9) Kantor Pelayanan Pajak, (10) Badan Meteorologi dan Geofisika, (11) Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, (12) PT. PLN (Persero) Gorontalo, (13) Bandara Jalaludin, (14) Kantor Pelabuhan Angrek dan (15) Kantor Pelabuhan Penyeberangan.

#### **b. Kepegawaian**

Salah satu kewajiban Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi induk adalah pengalihan kepegawaian. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima P3D Nomor : 180/6/069 tanggal 16 Pebruari 2002 dan Berita Acara Serah Terima Satker – P2D Nomor : 180/6/070 tanggal 16 Pebruari 2002, jumlah personil PNS Instansi Vertikal dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel I-1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah PNS		Jumlah Seluruhnya
		Intansi Vertikal	PemdaSulut	
1.	Golongan IV	447	497	944
2.	Golongan III	2.972	6.082	9.054
3.	Golongan II	1.358	4.827	6.185
4.	Golongan I	84	337	421
<b>Jumlah</b>		<b>4.861</b>	<b>11.743</b>	<b>16.604</b>

*Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo 2002*

Dari total jumlah PNS yang dialihkan sebanyak 16.604 orang 53,35 % diantaranya adalah guru yang mencapai 8.859 orang dengan rincian SD 5.706 orang, SMP 2.215 orang dan SMA 938 orang. Jumlah PNS yang dialihkan tersebut termasuk PNS instansi vertikal dan Pemda Sulawesi Utara yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Data PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Tabel I-2. Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah PNS</b>
Golongan IV	52
Golongan III	280
Golongan II	167
Golongan I	3
Jumlah	502

*Sumber : BKD Dan DIKLAT Provinsi Gorontalo 2002*

### c. Dokumen Daerah

Sebagai sebuah provinsi baru, Gorontalo membutuhkan berbagai dokumen penting sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dan panduan bagi Satuan Kerja didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2001, jumlah dokumen mencapai 312 buah yang terdiri dari 2 Peraturan Daerah, 243 SK Penjabat Gubernur Gorontalo, 19 Keputusan DPRD dan 21 Keputusan Pimpinan DPRD. Selebihnya merupakan hasil-hasil keputusan rapat yang meliputi Rapat Panitia Musyawarah 12 keputusan dan Rapat Anggaran 15 Keputusan.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan, maka disusunlah dokumen Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Strategis Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004 yang memuat Visi, Misi, Sasaran, Tujuan dan Program Pembangunan Daerah. Selanjutnya Visi, Misi, Sasaran, Tujuan dan

Program Pembangunan tersebut diuraikan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2002 sebagai salah satu kerangka acuan dan landasan hukum penyusunan APBD Tahun 2002.

Disamping itu, dalam rangka mengakselerasi percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan kerjasama pembangunan dengan berbagai pihak. Pada tahun 2001, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Bakosurtanal mendatangi Piagam Kerjasama Bidang Survey dan Pemetaan Sumberdaya Alam Spasial secara Bersistem dan Terintegrasi. Kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2002, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Pertama Provinsi Gorontalo, Ir. Fadel Muhammad dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Peningkatan Produksi Pertanian melalui pemanfaatan Pupuk NPK Pelangi. Ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka mengoptimalkan kinerja Tiga Program Unggulan dimana salah satunya adalah Pengembangan Pertanian dengan entri point Jagung. Seluruh MoU yang ditandatangani selang tahun 2002 berjumlah 14 buah yang terdiri atas bidang ketenagakerjaan 1 MoU, pertanian 4 MoU, perikanan 2 MoU, pendidikan 2 MoU, keuangan daerah 1 MoU, lptek 1 MoU, Energi 1 MoU dan perumahan permukiman 1 MoU.

#### **d. Anggaran Pembangunan**

Pada tahun 2001 realisasi Pendapatan APBD Provinsi Gorontalo baru mencapai Rp. 77.696.211.940 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 7.762.881.755,13, Dana Alokasi Umum (perimbangan) sebesar Rp. 48.477.455.824 dan Lain-lain Penerimaan yang Sah Rp. 21.455.874.361. Adapun rincian Pendapatan APBD 2001 sebagai berikut :

Tabel I-3. Pendapatan Daerah Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Sumber Pendapatan	Jumlah
Pendapatan Asli Daerah :	
1. Pajak Daerah	6.961.541.865
2. Retribusi Daerah	192.040.125
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	609.299.765
Dana Perimbangan :	
1. Bagi hasil pajak & bukan pajak	3.128.782.824
2. Dana Alokasi Umum	45.348.673.000
Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	
1. Dana Kontingensi (ST)	20.000.000.000
2. Kontingensi P3D	803.250.000
3. Bantuan Provinsi Sulawesi Utara	100.000.000
4. Potongan TPP	552.622.361
<b>Total Pendapatan</b>	<b>77.696.211.940</b>

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo 2002

Data diatas menunjukkan bahwa porsi Pendapatan APBD terbesar adalah penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang mencapai 62,39 %. Kemudian diikuti oleh penerimaan dari Dana Kontingensi sebesar 27,62 %. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari PAD baru mencapai 9,99 %. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya komponen PAD dalam pembentukan struktur APBD.

Sedangkan untuk dana yang bersumber dari APBN pada tahun 2001 tercatat pagu anggaran sebesar Rp. 73.383.608.184 yang terdiri dari Rupiah Murni Rp. 55.564.759.184 dan BLN sebesar Rp. 17.818.849.000 dengan realisasi mencapai Rp. 60.883.218.570 atau 82,97 %. Alokasi anggaran APBN lebih banyak diarahkan untuk program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti penyediaan

infrastruktur dasar ekonomi dan sosial, serta untuk menunjang kegiatan APBD lainnya disektor pertanian, perikanan, pendidikan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

**e. Sarana Dan Prasarana Pemerintahan**

Untuk mencapai tingkat pelayanan publik yang diharapkan, maka pemerintahan daerah memerlukan sarana dan prasarana yang representatif. Secara umum kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Gorontalo tahun 2001 dan 2002 masih sangat terbatas. Kantor Gubernur dan Sekretariat Daerah masih menempati eks Kantor Pembantu Gubernur Sulawesi Utara Wilayah II. Sedangkan dinas dan badan lingkup Provinsi Gorontalo lainnya menempati kantor milik Pemda Kota Gorontalo dan perguruan tinggi seperti Bappeda di Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Negeri Gorontalo, Badan Kesbang Linmas, Bawasda, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menempati kantor milik Pemda Kota Gorontalo. Sedangkan untuk dinas/badan lainnya menempati rumah-rumah penduduk yang disewakan.

Selain keterbatasan kantor, juga sarana operasional dan mobilitas badan/dinas masih sangat terbatas. Penyediaan kendaraan dinas roda empat masih sebatas pada pejabat eselon I dan II. Sedangkan untuk eselon III dan IV umumnya masih menggunakan roda dua. Hal ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja dalam menjalankan pelayanan publik. Berikut ini data inventaris milik instansi vertikal dan Pemda Sulawesi Utara yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Tabel I-4. Rekaputilasi perlengkapan/barang inventaris yang dialihkan dari Departemen kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo

No.	Kelompok perlengkapan/ Barang Inventaris	Jumlah		
		Kota Gorontalo	Kab. Gorontalo	Kab. Boalemo
1.	Tanah	84 Persil	33 Persil	26 Persil
2.	Bangunan	109 Unit	61 Unit	34 Unit
3.	Kendaraan Roda 2	11 Unit	9 Unit	1 Unit
4.	Kendaraan Roda 4	241 Unit	67 Unit	3 Unit

Sumber : Dokumen P3D Biro Pemerintahan Prov. Gorontalo 2001

Tabel I-5. Rekapitulasi perlengkapan/barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dialihkan kepada Prov. Gorontalo.

No.	Kelompok Perlengkapan/ Barang Inventaris	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Tanah	79.108 M2	3.074.911.600
2.	Bangunan	218 Unit	4.360.686.000
3.	Kendaraan Roda 2	186 Unit	144.900.000
4.	Kendaraan Roda 4	18 Unit	109.415.000
Jumlah			7.689.912.600

Sumber : Dokumen P3D Biro Pemerintahan Prov. Gorontalo 2001

Data diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh barang yang dialihkan merupakan inventaris Departemen dan Pemda Sulawesi Utara yang ada dan dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota. Sehingga oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, inventaris tersebut tetap diserahkan pengelolaannya kepada Pemda Kabupaten/Kota. Hanya sebagian kecil dari inventaris tersebut yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

## 2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kondisi ekonomi Gorontalo tahun 2001 menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah. Keadaan ini dipengaruhi oleh kinerja makro ekonomi yang rendah dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya strategis daerah yang meliputi pertanian, perikanan, SDM

dan daya dukung alam. Berikut ini akan diuraikan beberapa sektor strategis daerah yang erat kaitannya dengan ekonomi dan pembangunan di Gorontalo.

#### **a. Makro Ekonomi**

Berdasarkan data BPS Tahun 2001 dan angka Renstrada saat pisah dengan Sulawesi Utara mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2001 sebesar 5,38 % dengan PDRB atas dasar harga berlaku Rp. 1.896.306.000.000,- dan PDRB atas dasar harga konstan Rp. 924.318.000.000,- dengan PDRB per kapita sebesar Rp. 2.248.782,-

Rendahnya PDRB per kapita juga mengindikasikan rendahnya pendapatan masyarakat Gorontalo. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi kinerja indikator ekonomi antara lain rendahnya nilai ekspor komoditi unggulan yang baru mencapai US\$ 6.957.310,35, investasi Rp. 230 milyar dan inflasi mencapai 9,23 %. Disamping itu, kinerja perbankan menunjukkan posisi dana simpanan dan valas di Gorontalo baru sebesar Rp. 526.754.000.000,- Hal ini memperkuat dugaan rendahnya daya beli masyarakat yang diperkirakan saat itu baru mencapai Rp. 150.000,-.

Struktur perekonomian Gorontalo pada tahun 2001 didominasi oleh sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi masing-masing pertanian 33,71 % : jasa-jasa 16,26 % : perdagangan, hotel dan restoran 16,01 %.

#### **b. Pertanian**

Pertanian dalam arti luas merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi di Gorontalo. Peran pertanian bukan sekedar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tetapi juga menjadi salah satu sektor yang dapat memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui nilai tambah hasil produksi pertanian.

Peta penggunaan lahan di Gorontalo tahun 2001 menunjukkan 83,74 % pemanfaatannya untuk usaha pertanian yakni tegalan/kebun/ladang, huma, empang/tebat/kolam, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta dan lahan persawahan. Luas

lahan pertanian mencapai 1,02 juta Ha, sedang luas lahan untuk pekarangan dan lainnya berkisar 198,57 ribu ha atau 16,26 %.

Produksi pertanian di Gorontalo tahun 2001 didominasi oleh beras dengan luas panen mencapai 35.639 Ha dan jumlah produksi mencapai 158.870 ton dengan rata-rata produksi sebesar 44,58 kwintal per hektar. Kemudian diikuti oleh Jagung dengan luas panen mencapai 36.610 hektar dan jumlah produksi sebesar 81.720 ton dengan rata-rata produksi sebesar 22,32 kwintal per hektar. Sedangkan untuk perkebunan, produksi tertinggi adalah Kelapa dengan luas lahan mencapai 58.411,97 hektar dan jumlah produksi sebesar 59,024,40 ton atau rata-rata per hektar dalam bentuk Kopra berkisar 1.010 kilogram. Kemudian diikuti oleh Tebu dengan lahan seluas 2.745,65 hektar dan produksi mencapai 10.907 ton atau rata-rata produksi per hektar per tahun sebesar 4,76. Selanjutnya Cengkeh dengan jumlah produksi mencapai 1.406,76 ton dengan luas lahan 2.775,29 hektar.

Kakao dan Kemiri juga merupakan tanaman yang umum di tanam masyarakat Gorontalo. Pada tahun 2001 luas tanam Kakao mencapai 4.070,39 hektar dengan luas tanaman menghasilkan 1.792,08 hektar (44,02 %) dengan produksi sebesar 816,36 ton. Sedangkan luas lahan Kemiri mencapai 3.602,83 hektar dengan jumlah produksi mencapai 553,92 ton dengan lahan seluas.

Disamping berbagai produk pertanian diatas, Gorontalo juga berpotensi untuk pengembangan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Potensi pengembangan perikanan tangkap terbesar terdapat pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP Teluk Tomini sampai dengan Laut Seram di bagian Selatan dan WPP Laut Sulawesi sampai dengan Samudra Pasifik di bagian Utara Gorontalo. Sedangkan untuk potensi pengembangan perikanan budidaya berada pada pesisir/garis pantai Gorontalo dengan panjang mencapai 560 km dengan luas wilayah laut 50.500 km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2001, produksi perikanan Gorontalo tercatat perikanan tangkap sebesar 23.231,1 ton dan perikanan budidaya mencapai 4.775,5 dengan total produksi mencapai 28.006,6 ton.

### **c. Perdagangan dan Industri**

Disamping pertanian, sektor perdagangan juga merupakan salah satu kegiatan dominan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor ini menempati urutan ketiga dalam pembentukan struktur PDRB Gorontalo setelah pertanian dan jasa-jasa, dengan kontribusi mencapai Rp. 303,611 milyar atau sekitar 16,01 %.

Komoditi perdagangan yang terbanyak keluar dari Gorontalo tahun 2001 adalah rotan, sapi, kayu log, jagung, batang kelapa dan kayu olahan. Berdasarkan data BPS (2002), jumlah Rotan yang keluar dari Gorontalo mencapai 78.008,01 ton, Sapi sebanyak 7.580 ekor, Kayu Log 5.628,49 M3, Jagung 4.499,2 ton, Batang Kelapa 1.491,17 M3 dan Kayu Olahan 1.267,39 M3.

Sedangkan untuk sektor industri umumnya belum berkembang seperti halnya sektor perdagangan. Dalam pembentukan PDRB sektor ini menyumbangkan kontribusi sebesar 9,99 % dengan nilai Rp. 189,458 milyar. Jumlah perusahaan di Gorontalo tahun 2001 baru sebanyak 89 perusahaan yang terdiri dari industri makanan, minuman dan tembakau sebanyak 50 perusahaan, industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk furniture 20 perusahaan, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit 15 perusahaan, industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi 2 perusahaan dan industri barang dari logam, mesin dan peralatannya sebanyak 2 perusahaan. Data industri pengolahan dan jumlah tenaga kerja tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Tabel I-6. Data Industri Pengolahan dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2001

Golongan Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri makanan, minuman & tembakau	50	2.600
Industri kayu & barang2 dari kayu termasuk furniture	20	2.008
Industri tekstil pakaian jadi dan kulit	15	551
Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi	2	63
Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	2	89
T o t a l	89	5.311

*Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2002)*

Data diatas menunjukkan industri yang memiliki daya serap tinggi terhadap tenaga kerja adalah Industri kayu & barang2 dari kayu termasuk furniture yakni sebanyak 100,4 tenaga kerja per satu industri. Sedangkan yang terkecil daya serapnya adalah Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi sebanyak 31,5 tenaga kerja per satu industri.

#### **d. Sarana Ekonomi**

Kinerja sektor unggulan yang rendah dan keterbatasan sarana prasarana dasar ekonomi juga mengakibatkan rendahnya mobilitas barang dan penumpang di Gorontalo. Pada tahun 2001, Gorontalo hanya di masuki oleh satu maskapai penerbangan (Merpati Air Lines) yang melalui Bandara Djalaludin. Kapasitas angkut sangat terbatas, dengan jenis pesawat Casa 212 untuk 12 penumpang dengan route penerbangan Gorontalo – Manado. Bahkan sebelumnya (tahun 2000) tidak ada penerbangan yang masuk ke Gorontalo.

Demikian halnya dengan arus lalu lintas barang dan penumpang baik yang melalui Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang dan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Gorontalo. Lesunya

pergerakan ekonomi daerah tidak saja dikarenakan keterbatasan sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki daerah, tetapi juga turut dipengaruhi oleh indikator makro ekonomi nasional dimana tahun 2001 Indonesia masih mengalami krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya, jumlah penduduk miskin dan pengangguran di daerah bertambah sebagai dampak ketidakstabilan ekonomi saat itu.

### **3. Bidang Sosial Budaya**

Secara umum aspek pembangunan dibidang sosial budaya sangat terkait erat dengan pembangunan ekonomi daerah. Aspek-aspek tersebut antara lain tingkat pendidikan masyarakat, kesehatan, tenaga kerja, keagamaan, pelanggaran hukum, penyandang masalah sosial yang bermuara pada permasalahan inti yakni kemiskinan. United Nation (PBB) bahkan telah menetapkan aspek-aspek tersebut sebagai parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam bentuk komitmen bersama internasional melalui program Millenium Development Goals (MDGs) 2015.

Berikut ini akan diuraikan kondisi sosial budaya Gorontalo tahun 2001.

#### **a. Pendidikan**

Sebagaimana umumnya daerah di Kawasan Timur Indonesia, kondisi sektor pendidikan di Gorontalo pada tahun 2001 masih tergolong rendah. Data BPS menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD sebesar 113,78 %, SMP sebesar 55,24 % dan SMA baru mencapai 30,80 %. Untuk lebih lengkapnya data APK dan APM berbagai jenjang pendidikan di Gorontalo tahun 2001 akan disajikan melalui tabel berikut.

Tabel I-7. APK dan APM Jenjang Pendidikan

Indikator	Persentase (%)
<b>Angka Partisipasi Kasar :</b>	
- SD/MI	113,78
- SMP/MTs	55,24
- SMA/MA	30,80
<b>Angka Partisipasi Murni :</b>	
- SD/MI	94,41
- SMP/MTs	38,24
- SMA/MA	22,67

Sumber : - BPS Provinsi Gorontalo (2002)

- Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov. Gorontalo

Data diatas menunjukkan angka partisipasi murni jenjang pendidikan SD sebesar 94,41 %. Ini berarti jumlah anak usia sekolah 7 – 12 tahun yang bersekolah mencapai 109.146 siswa dari total 115.608 anak usia SD. Sedangkan untuk anak usia sekolah 13 – 15 tahun yang duduk di bangku SMP baru mencapai 38,24 % atau 18.195 siswa dari total 47.581 anak usia SMP. Dan untuk usia sekolah 16 – 18 tahun yang duduk di bangku SMA baru sebesar 22,67 % atau 11.461 siswa dari total 50.558 anak usia SMA. Dari uraian ini terlihat baik APK maupun APM untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA masih sangat rendah, dimana jumlah anak usia sekolah yang duduk di bangku SMP dan SMA belum mencapai setengah dari jumlah anak usia sekolah.

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Gorontalo saat itu adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan tenaga guru yang memadai. Pada tahun 2001, jumlah SD di Gorontalo sebanyak 789 buah, jumlah murid sebanyak 117.248 orang dan 5.789 guru dengan rasio murid terhadap guru sekitar 20,25 orang. Untuk SMP tercatat 126 sekolah, jumlah murid mencapai 28.335 siswa dan 1.801 guru dengan rasio murid terhadap guru sebesar 12 orang. Sedangkan untuk SMA

sebanyak 50 sekolah, jumlah murid 17.269 siswa dan guru 1.074 dengan rasio murid terhadap guru sebesar 13 orang.

## b. Kesehatan

Salah satu peran penting pemerintah daerah dalam pembangunan bidang kesehatan adalah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas baik dari sisi finansial maupun lokasi sarana kesehatan. Kondisi obyektif bidang kesehatan di Gorontalo tercermin dari keberadaan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan tenaga kesehatan yang tersedia. Berdasarkan data BPS tahun 2001 di Gorontalo telah berdiri 6 rumah sakit yang terdiri dari 2 rumah sakit umum (RSU), 1 rumah sakit khusus (Kusta, di Kec. Kabila), 1 rumah sakit ABRI dan 2 rumah sakit swasta. Kapasitas tempat tidur yang dimiliki oleh keenam rumah sakit tersebut berjumlah 365 tempat tidur. Jika ditinjau dari jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk maka setiap unit rumah sakit rata-rata melayani 589 orang dari 840.386 penduduk per satu tahun atau kapasitas layanan setiap unit rumah sakit baru mencapai 0,17 % dari jumlah penduduk.

Berikut data jumlah rumah sakit beserta kapasitas tempat tidur di Provinsi Gorontalo tahun 2001.

Tabel I-8. Jumlah Rumah Sakit Provinsi Gorontalo Tahun 2001

Jenis Rumah Sakit	Jumlah	Tempat Tidur	Lokasi
1. Rumah Sakit Umum	2	263	Kota/Kab Gtlo
2. Rumah Sakit Khusus	1	37	Kab. Gtlo
3. Rumah Sakit ABRI	1	25	Kota Gtlo
4. Rumah Sakit Swasta	2	40	Kota Gtlo
T o t a l	6	365	

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2002)

Selanjutnya menyangkut sarana kesehatan lainnya di Gorontalo pada tahun 2001 tercatat Puskesmas sebanyak 39 unit, Puskesmas Pembantu 211 unit, Puskesmas Keliling Darat 31 unit, Puskesmas Keliling Laut 2 unit dengan

total jumlah mencapai 283 unit. Data sebaran sarana kesehatan per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 1-9. Jumlah Puskesmas Provinsi Gorontalo Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Jumlah			
	Puskesmas	Pustu	Puskesmasling Darat	Puskesmasling Laut
Kab. Gorontalo	22	126	17	2
Kab. Boalemo	11	53	8	-
Kota Gorontalo	6	32	6	-
Total	39	211	31	2

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2002)

Dengan membandingkan jumlah sarana kesehatan diatas dengan jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Gorontalo maka dapat disimpulkan bahwa semua kecamatan telah memiliki Puskesmas dengan prosentase mencapai 185,71 %. Atau jika dirata-ratakan 18 dari 21 kecamatan di Provinsi Gorontalo memiliki lebih dari satu Puskesmas. Sedangkan untuk tingkat desa/kelurahan, dari 372 desa/kelurahan baru 211 diantaranya yang memiliki Puskesmas Pembantu, atau baru mencapai 56,72 %. Hal ini menunjukkan masih terdapat hampir seperdua dari total desa/kelurahan di Gorontalo yang belum memiliki sarana kesehatan Puskesmas Pembantu.

Disamping sarana kesehatan yang terbatas, Gorontalo juga kekurangan tenaga kesehatan. Data menunjukkan pada tahun 2001 di Gorontalo baru terdapat 70 dokter dengan kualifikasi dokter umum 48 orang, dokter gigi 9 orang dan spesialis 13 orang. Sedangkan tenaga paramedis berjumlah 1.087 orang dengan spesifikasi perawatan sebanyak 981 orang dan non perawatan 106 orang. Berikut data jumlah tenaga kesehatan di Gorontalo tahun 2001.

Tabel I-10. Jumlah Tenaga Medis Provinsi Gorontalo Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Dokter			Tenaga Paramedis	
	Umum	Gigi	Spesialis	Perawatan	Non Perawatan
Kab. Gorontalo	19	3	12	576	53
Kab. Boalemo	13	2	-	63	19
Kota Gorontalo	16	4	1	342	34
Jumlah	48	9	13	981	106

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2002)

Data diatas menunjukkan bahwa rata-rata seorang tenaga kesehatan harus dapat melayani 839 penduduk atau 0,10 % dari jumlah penduduk tahun 2001. Ini berarti Gorontalo masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan baik dokter maupun tenaga paramedis dengan berbagai kualifikasi.

Keterbatasan-keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menyebabkan sejumlah indikator kesehatan di Gorontalo pada tahun 2001 terkategori rendah. Angka harapan hidup baru mencapai 61 tahun, angka kematian bayi mencapai 23,00 per 1.000 kelahiran dan kematian ibu melahirkan sebesar 324/100.000 kelahiran. Sementara itu juga, masih terdapat Balita rawan gizi yang mencapai lebih kurang 17,90 % dari total Balita di Gorontalo.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2001 Gorontalo masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan kesehatan, dimana pembangunan SDM daerah ke depan perlu memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat sebagai salah satu sektor prioritas.

### c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan modal utama dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Seiring dengan berlangsungnya proses perpindahan, kelahiran dan kematian penduduk, jumlah dan komposisi tenaga kerja terus mengalami perubahan.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2000 angkatan kerja sementara yang bekerja di Kota Gorontalo mencapai 89,17 %, Kabupaten Gorontalo 7,80 % dan Kabupaten Boalemo 10,14 %. Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo sebesar 81,39 %. TPAK merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. Dengan asumsi tersebut berarti untuk setiap 100 tenaga kerja di Gorontalo terdapat 81,39 angkatan kerja, atau dari 100 tenaga kerja 19,61 diantaranya bukan angkatan kerja.

Sedangkan untuk tahun 2002, jumlah angkatan kerja di Gorontalo mencapai 321.753 orang dengan kesempatan kerja yang tersedia sebesar 294.792 orang. Ini menunjukkan pengangguran terbuka di Gorontalo mencapai 26.961 orang atau 8,38 % dari total angkatan kerja.

Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Gorontalo tahun 2001 adalah sebagai berikut. Sektor pertanian mencapai 56,78 %, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,28 %, sektor jasa-jasa 11,77 %, sektor industri 7,49 %, sektor angkutan 4,72 %, sektor listrik, gas, air minum dan bangunan 2,96 %, sektor pertambangan dan galian 2,03 %, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya 0,93 % dan terakhir lain-lain sebesar 0,04 %. Untuk lebih lengkapnya diuraikan dibawah ini.

Tabel I-11. Presentase Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Provinsi Gorontalo Tahun 2001

Lapangan Kerja (Sektor)	Persentase Penduduk			
	Kab. Gtlo	Kab. Boalemo	Kota Gtlo	Total Provinsi
Pertanian	59,69	76,76	14,11	56,78
Pertambangan & galian	1,17	4,50	1,77	2,03
Industri	6,95	5,63	12,55	7,49
Listrik, gas, air minum dan pembangunan	2,63	1,01	7,25	2,96
Perdagangan, hotel &	13,32	5,55	25,03	13,28

restoran				
Angkutan	4,32	2,30	10,09	4,72
Bank & lembaga keu. Lainnya	0,91	0,21	2,15	0,93
Jasa-jasa	11,01	3,94	26,93	11,77
Lainnya	-	0,10	0,13	0,04

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2002)

Data diatas menunjukkan pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk Gorontalo, dimana daya serap sektor ini terhadap tenaga kerja sangat tinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini juga mengindikasikan struktur masyarakat Gorontalo masih berada pada tataran masyarakat tradisional, kecuali untuk Kota Gorontalo dimana tenaga kerja lebih banyak terserap pada sektor jasa-jasa, perdagangan hotel dan restoran serta industri.

#### **d. Hukum, Kemasyarakatan dan Keagamaan**

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Gorontalo relatif stabil dan kondusif. Beberapa indikator yang mendukung hal ini antara lain jumlah perkara pidana khusus/umum yang dilaporkan dan diselesaikan menurut tindak pidana di wilayah hukum Gorontalo pada tahun 2001 sebanyak 166 kasus. Dari jumlah tersebut, 164 kasus diantaranya adalah pidana umum, 1 kasus korupsi dan 1 kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Jika dibandingkan dengan daerah lain, jumlah kasus tindak pidana di Gorontalo tergolong rendah dengan frekuensi kejadian sebanyak 0,45 kasus per hari.

Berbeda dengan daerah lainnya di Sulawesi, di Gorontalo tidak pernah terjadi perkelahian antar kampung atau konflik Sara yang melibatkan massa. Hal ini dikarenakan kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Gorontalo sangat terpelihara. Nilai-nilai demokrasi yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan simbol budaya “huyula” atau gotong-royong masih sangat mewarnai kehidupan masyarakat. Demikian halnya dengan

prinsip “Adat bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah”. Kedua nilai tersebut merupakan hukum sekaligus perekat seluruh masyarakat dengan keharusan menjalankan syariat bagi pemeluk agama Islam dan kewajiban menghormati dan membantu pemeluk agama lain.

Berdasarkan data Kanwil Depag Provinsi Gorontalo (2002) jumlah penduduk menurut agama tahun 2001 adalah; Islam 853.094 jiwa, Protestan 12.862 jiwa, Katolik 2.328 jiwa, Hindu 3.038 jiwa dan Budha 1.620 jiwa. Sedangkan jumlah tempat peribadatan; Masjid sebanyak 1.392 buah, 124 Mushola, 94 Gereja Protestan, 15 Gereja Katolik, 3 Pura dan 3 Vihara.

Salah satu kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat adalah Ibadah Haji. Menurut catatan Kanwil Depag Provinsi Gorontalo, jumlah Jemaah Haji tahun 2001 sebanyak 309 orang yang terdiri atas 199 perempuan dan 110 laki-laki.

Dalam rangka mengantisipasi masuknya pengaruh dari luar khususnya yang berasal dari daerah-daerah konflik seperti Ambon dan Poso yang berbatasan langsung dengan Gorontalo, maka pada tahun 2000 dibentuklah Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) secara berjenjang dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Kecamatan. Peran lembaga ini cukup penting dalam rangka meredam potensi konflik di masyarakat mengingat Gorontalo merupakan salah satu daerah tujuan pengungsi dari Maluku, Maluku Utara dan Poso.

Disamping itu pula pada tahun 2001 telah lahir wacana pemekaran wilayah. Hal ini dipicu oleh dua hal yakni kebutuhan pengembangan wilayah dua Kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo dengan luas mencapai 6.411,38 Km<sup>2</sup> dan Kabupaten Boalemo 6.739,27 Km<sup>2</sup>. Alasan kedua adalah pertimbangan kapasitas layanan dan kontrol pemerintahan, dimana akan lebih efektif jika kedua daerah tersebut dimekarkan guna mendekatkan layanan kepada masyarakat dan efektivitas pelaksanaan kewenangan, fungsi dan kontrol pemerintahan. Wacana pemekaran yang berkembang adalah pembentukan Kabupaten Pohuwato sebagai wilayah pemekaran Kabupaten

Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah pemekaran Kabupaten Gorontalo.

#### 4. Bidang Infrastruktur

Perkembangan ekonomi suatu daerah turut ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang. Berbagai infrastruktur dimaksud adalah perhubungan, pos dan telekomunikasi, kelistrikan, irigasi dan air minum. Berikut ini akan diuraikan kondisi infrastruktur di Gorontalo tahun 2001.

##### a. Perhubungan

Sektor perhubungan memiliki andil dan peran penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi daerah. Berdasarkan fungsinya, sektor perhubungan terdiri atas perhubungan darat, udara, laut dan penyeberangan.

Pada tahun 2001, panjang jalan di Provinsi Gorontalo mencapai 769,05 km, dengan panjang jalan nasional mencapai 551,03 km dan jalan provinsi 218,02 km. Berdasarkan laporan Dinas PU Kimpraswil Provinsi Gorontalo, 468,69 km dalam kondisi baik, rusak ringan 191,46 km dan rusak berat mencapai 108,9 km. Data tentang panjang dan kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

Tabel I-12. Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2001

Jenis Jalan	Kondisi Tahun 2001 (Km)			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Jalan Nasional	401,76	91,06	58,21	551,03
Jalan Provinsi	66,93	100,4	50,69	218,02
Total	468,6	191,46	108,9	769,05

Sumber : PU Kimpraswil Provinsi Gorontalo (2002)

Data diatas menunjukkan panjang jalan nasional di Provinsi Gorontalo mencapai 71,65 % dan jalan provinsi 28,35 %. Panjang jalan dalam kondisi

baik mencapai 60,93 %, rusak ringan 24,90 % dan rusak berat 14,16 %. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Gorontalo yang mencapai 12.215,45 km<sup>2</sup> maka ketersediaan jalan baru mencapai 6,30 %. Ini berarti kebutuhan Gorontalo akan sarana jalan masih sangat tinggi.

Selanjutnya untuk sarana perhubungan udara, Gorontalo memiliki satu bandar udara yakni Djalaludin yang berlokasi di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2001, bandara Djalaludin memiliki panjang Runway 1.850 x 30 m, Apron 3.100 M2 dan VIP room 100 M2. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel I-13. Sarana Perhubungan Udara Provinsi Gorontalo Tahun 2001

<b>Fasilitas</b>	<b>Volume Tahun 2001</b>
Runway	1.850 x 30 M
Turning Area (9)	-
Apron	3.100 M2
VIP Room	100 M2

*Sumber : Dinas Perhubungan, Postel & Pariwisata Prov. Gorontalo*

Sesuai dengan kapasitas runway yang dimiliki, Bandara Djalaludin pada saat itu baru bisa didarati oleh pesawat jenis Foker 28, Foker 100 dan MD 80. Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi baru dua yakni Merpati Air Lines dengan route penerbangan Gorontalo Manado (PP) dan Pelita Air Gorontalo – Makassar – Jakarta (PP).

Sampai dengan tahun 2001 jumlah penumpang yang melalui bandara Djalaludin tercatat yang berangkat sebanyak 4.760 orang, tiba 3.332 orang dan transit 3.469 orang. Sedangkan arus lalu lintas barang dan bagasi adalah; barang bongkar 12.015 kg, barang muat 4.872 kg, Bagasi bongkar 32.710 kg dan bagasi muat mencapai 54.694 kg.

Sedangkan untuk sarana pelabuhan laut dan penyeberangan, sampai dengan tahun 2001 Provinsi Gorontalo memiliki tiga pelabuhan laut yakni Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Kwandang dan Pelabuhan Anggrek.

Namun yang aktif dilayari baru Pelabuhan Gorontalo dan Kwandang. Untuk Pelabuhan Anggrek masih dalam tahap pembangunan. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pelabuhan adalah dermaga, menara suar, gudang penumpukan, area parkir dan jalan menuju pelabuhan/dermaga sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 1.14. Sarana Perhubungan Laut Provinsi Gorontalo Tahun 2001

<b>Fasilitas</b>	<b>Pel. Gorontalo</b>	<b>Pel. Kwandang</b>	<b>Pel. Anggrek</b>
Dermaga	I. 60 m x 10,5 m II. 120 m x 10 m	37 x 6 m	120 m x 12 m
Menara suar	1 unit	2 unit	-
Gudang penumpukan	I. 560 m <sup>2</sup> II. 1.000 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
Area parkir pelabuhan	-	-	1.546 m <sup>2</sup>
Jalan menuju pelabuhan/dermaga	0,3 km	0,1 km	0,297 km

*Sumber : Dinas Perhubungan, Postel & Pariwisata Prov. Gorontalo*

Banyaknya kapal yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Gorontalo tahun 2001 berjumlah 729 kapal dengan volume bongkar 299.564,556 ton dan muat sebanyak 59.317,283 ton. Dari jumlah ini terlihat volume bongkar mencapai 5 kali lipat dari volume muat. Ini berarti jumlah barang yang masuk lebih banyak dari jumlah barang yang keluar, termasuk komoditi ekspor Gorontalo. Sedangkan untuk jumlah penumpang tahun 2001 yang turun sebanyak 56.007 penumpang dan naik 57.596 penumpang.

Untuk Pelabuhan Kwandang tahun 2001 jumlah kapal yang masuk dan keluar sebanyak 733 kapal. Volume bongkar mencapai 181.165 ton dan muat sebanyak 56.800 ton. Sedangkan jumlah penumpang yang turun mencapai 56.800 penumpang dan naik sebanyak 52.215 penumpang.

Sedangkan untuk pelabuhan penyeberangan di Gorontalo sejak tahun 1999 telah dibangun Pelabuhan Ferry yang menghubungkan Gorontalo dengan daerah-daerah di Sulawesi Tengah. Fasilitas yang dimiliki oleh pelabuhan penyeberangan ini antara lain dermaga 98 M, menara suar 2 unit buah, lapangan penumpukan (0) M2, dan jalan menuju pelabuhan/dermaga 0,3 km. Hal ini menunjukkan bahwa Gorontalo masih membutuhkan tambahan sarana prasarana pelabuhan guna mengantisipasi lonjakan arus barang, jasa dan penumpang seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah dimasa-masa yang akan datang.

#### **b. Pos Dan Telekomunikasi**

Pada tahun 2001 Kantor pelayanan pos di Gorontalo mencapai 24 unit yang terdistribusi di Kabupaten/Kota. Pengiriman benda pos dalam dan luar negeri mencapai 7.291 lembar yang terdiri dari benda pos yang dikirim sebanyak 561 lembar atau 7,69 % dan 6.730 atau 92,31 % yang diterima termasuk yang berasal dari luar negeri sebanyak 23 lembar. Sementara untuk Poswesel yang diterima dari dalam negeri sebanyak 12.203 lembar dan luar negeri sebanyak 11 lembar. Keterbatasan sarana dan prasarana Kantor Pos sangat mempengaruhi kapasitas layanan dan jumlah benda pos yang masuk dan keluar dari Gorontalo.

Sedangkan untuk sarana prasarana telekomunikasi di Gorontalo tahun 2001 masih sangat minim. Kantor Cabang PT. Telkom yang berdiri baru dua unit masing-masing di Kota dan Kabupaten Gorontalo, sedangkan untuk Kabupaten Boalemo masih berstatus cabang pembantu. Namun animo masyarakat untuk memanfaatkan jaringan telpon cukup tinggi. Pada tahun 2000 jumlah pengguna telpon mencapai 12.353 pelanggan dan pasang baru tercatat 2.715 pelanggan sehingga total pengguna telpon di Gorontalo sebanyak 15.068 pelanggan atau dalam tahun yang sama naik sebesar 21,98 %.

### **c. Ketenagalistrikan**

Listrik merupakan kebutuhan dasar bagi aktivitas ekonomi dan pembangunan Gorontalo. Secara operasional produksi listrik PT. PLN (Persero) Gorontalo berasal dari 1 unit cabang wilayah, 3 ranting dan 17 sub ranting dan 3 kantor jaga. Kapasitas daya terpasang yang dihasilkan oleh PT. PLN (Persero) Gorontalo tahun 2001 baru mencapai 45.580 kVA dengan total produksi sebesar 82.337.939 kWh atau naik sebesar 14,53 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan daya listrik yang terjual mencapai 73.156.296 kWh atau sekitar 88,85 % dari total produksi. Berarti ada sekitar 11,15 % daya yang hilang yang diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi serta faktor lain di luar jaringan seperti adanya pencurian arus listrik.

Produksi listrik selang tahun 1996 – 2001 menunjukkan kenaikan yang berarti. Rata-rata kenaikan pertahun mencapai 15,07 %. Kenaikan ini seiring dengan kebutuhan dasar listrik untuk konsumsi rumah tangga, pemerintahan termasuk TNI dan Polri, industri dan perdagangan serta untuk kepentingan lain seperti usaha jasa dan pariwisata.

Dengan membandingkan kapasitas produksi listrik dengan trend kenaikan konsumsi listrik maka dapat diperkirakan dalam satu atau dua tahun kedepan (2002 dan seterusnya) Gorontalo akan mengalami krisis listrik. Kapasitas produksi tahun 2001 sebesar 82.337.939 kWh tidak akan mampu memenuhi kebutuhan listrik tahun 2002 yang diperkirakan akan mencapai 124.083.274 kWh. Demikian pula untuk seterusnya seiring dengan kebutuhan pasokan listrik untuk industri, jasa dan rumah tangga.

### **d. Air Minum**

Ketersediaan air minum yang bersih dan sehat sangat penting bagi masyarakat. Data tahun 2001 menunjukkan kapasitas produksi air minum PDAM mencapai 5.181.545 M3. Dari jumlah tersebut yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 3.471.113 M3 atau 66,99 %. Ini berarti terdapat 33,01 % dari total produksi air yang dihasilkan tidak tersalur ke

masyarakat (*missing water*). Hal ini diakibatkan oleh gangguan teknis jaringan distribusi atau karena adanya kebocoran dan kerusakan pipa saluran distribusi.

Berdasarkan data tahun 2002, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlayani oleh sarana air bersih baru mencapai 14.722 KK atau sekitar 6,76 % dari total 217.678 KK di Gorontalo. Berarti masih lebih kurang 202.956 KK yang belum dijangkau oleh layanan air minum PDAM. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan air minum untuk sektor jasa dan industri.

#### **e. Irigasi**

Salah satu infrastruktur dasar ekonomi yang turut menentukan produktivitas daerah adalah irigasi. Pada tahun 2001 Daerah Irigasi (DI) di Gorontalo berjumlah 24 DI, dimana 12 diantaranya dalam kondisi baik, 11 DI rusak ringan dan 1 DI rusak berat. Luas pengembangan areal irigasi baru mencapai 34.199 hektar. Jika dibandingkan dengan areal potensial pertanian di Gorontalo yang mencapai 463.649,09 hektar berarti layanan irigasi untuk pertanian baru mencapai 7,38 %.

Pengembangan air tanah di Provinsi Gorontalo yang telah dibangun oleh Provinsi Sulawesi Utara hingga tahun 2000 mencapai 1.030 hektar yang tersebar di Kabupaten Gorontalo dan Boalemo. Sedangkan untuk rencana pengembangan air tanah yang diperlukan mencapai 1.400 hektar untuk areal potensi lahan kering yang tersebar di tiga cekungan yakni Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo (Paguyaman dan Marisa).

Dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya air (irigasi dan air tanah) maka ke depan Gorontalo masih membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan pertanian sebagai salah satu program unggulan daerah.